



Bekerja Tanpa Batas



03 Pesona Halal Kota Gemilang

Banda Aceh memiliki banyak tempat yang dapat dijadikan magnet untuk mendatangkan wisatawan, terutama mereka yang berasal dari Asia Tenggara dan negara-negara berpenduduk muslim.



05 Kala SKPK Semakin Terbuka

Banda Aceh memiliki banyak tempat yang dapat dijadikan magnet untuk mendatangkan wisatawan, terutama mereka yang berasal dari Asia Tenggara dan negara-negara berpenduduk muslim.



07 Ponten Hijau Kota Gemilang

Skor mendekati 100 tak berarti lembaga yang bersangkutan terbebas sepenuhnya dari potensi korupsi. Di sistem sebaik apapun, para penjahat akan mencari celah untuk melakukan korupsi.

◆◆◆ SALAM REDAKSI



Bustami

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Berkah

SERING kali kita menganggap kehidupan sosial, urusan pekerjaan dan hal-hal duniawi lainnya hanya ada di bumi saja. Padahal, seluruh kehidupan ini, sejak kita membuka mata hingga menutup kembali mata untuk beristirahat terjadi karena kehendak Allah yang Maha Kuasa.

Kehidupan spiritual ini sangat terkait dengan cara kerja kita. Seorang pejabat yang memahami bahwa kekuasaan yang ada di tangannya adalah bagian dari amanah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa hanya akan mempergunakan kekuasaan itu untuk menebar nilai-nilai kebajikan; menggapai hal-hal yang diridai oleh Allah.

Dalam kehidupan di kota ini, yang sebagian besar memeluk Islam sejak lahir, nilai-nilai syariat Islam itu dipandang secara sangat sederhana: salat, puasa, mengajari, berhaji, dan ibadah-ibadah lainnya, termasuk ibadah sunah.

Padahal Islam menyentuh seluruh sisi kehidupan. Terutama etos kerja. Bahkan Nabi Muhammad saw berpesan bahwa muslim kuat lebih dicintai Allah ketimbang muslim lemah.

Seorang muslim atau muslimah harus mampu menumbuhkan etos kerja islam dan menjadikan pekerjaan mereka sebagai bagian dari ibadah. Pendapatan dari pekerjaannya juga bisa digunakan untuk kepentingan ibadah, termasuk di dalamnya menghidupi ekonomi keluarga.

Itulah berkah. Penghasilan yang diperoleh dengan keberkahan akan menjadikan hidup dan ibadah menjadi lebih khusuk. Bekerja pun lebih terarah.

Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri terus berbenah. Bahkan pemerintah kota menjadi yang tertinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan meraih Anugerah Pesona Indonesia (API) untuk kategori Wisata Halal Terpopuler.

Dua hal ini jelas bukan sesuatu yang datang dari langit tiba-tiba. Ini adalah upaya dari seluruh elemen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik.

Kita harus meyakini bahwa berkah dan kebaikan akan datang ke kota ini jika seluruh elemen masyarakat; para pemimpin dan yang dipimpin, mampu menunjukkan etos kerja islami. (*)

Banda Aceh Bersinar Tanpa Narkoba

Oleh: Hasnanda Putra*

Banda Aceh terletak di ujung paling barat daratan Sumatera, memiliki wilayah yang menghadap ke laut lepas diantara Samudera Hindia dan Selat Malaka. Posisi sangat strategis ini menjadi peluang sekaligus menjadi ancaman, karena garis pantai sepanjang 17 Km ini berpotensi menjadi entry point narkoba. BNN Kota Banda Aceh mencatat terdapat 18 titik entry point di Kota Banda Aceh, sebagian besar "pintu masuk" itu berada di pinggiran pantai.

Sejak ditetapkan Indonesia Darurat Narkoba berbagai hal telah dilakukan oleh BNN dan pihak terkait lainnya, namun ini bukanlah perang kecil antar satu dua negara dengan perbatasan terdekat tapi Perang Besar yang melibatkan banyak jaringan sekaligus "pembiaran" oleh oknum penjaga keamanan laut negara tetangga.

Akibatnya "berton-ton" narkoba dengan berbagai modus terus masuk ke wilayah hukum Indonesia, dan dalam hal serbu ini karena letak wilayah Banda Aceh di tepi laut dengan perbatasan langsung ke beberapa negara tetangga maka Banda Aceh telah masuk dalam "sarang" ancaman bandar narkoba.

Narkoba bukan barang baru, sejak perang cendu benda haram ini telah beredar dan terus berubah dalam berbagai jenis. Semua jenis dengan nama-nama yang berbeda tetap menghadirkan masalah yang sama yaitu bencana merusak otak, tubuh dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan.

Kita sedang diserbu oleh bandar, maka bersiaplah karena perang ini jauh lebih dahsyat daya rusak dan menjadi malapetaka yang tak pernah dirasa manusia di Perang Dunia sekalipun.

Bagaimana kita melihat Banda Aceh? Banda Aceh bukan lagi sekedar tempat transit tetapi dalam beberapa kasus juga kota ini telah menjadi tujuan. Kondisi ini tentu tidak baik, apalagi berbagai upaya menaikkan citra kota dengan segala prestasi yang diterima akan menjadi sia-sia apabila persoalan narkoba tidak tertangani dengan baik.

Sebagai ibu kota Aceh, Banda Aceh menjadi tempat bertemunya warga dari 23 kabupaten kota. Dari Tamiang sampai Singkil, dari Simeulue sampai Sabang. Kota dengan luas wilayah 61,36 km² ini berpenduduk 273.377 jiwa (sumber Disdukcapil Banda Aceh/30 November 2018) tersebar di 9 Kecamatan 90 Gampong.

Persoalan narkoba sangat memprihatinkan, menurut Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2017 terdapat 3,376,115 jiwa jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Angka ini memang telah menurun dari tahun sebelumnya, tetapi jumlah ini tentu tidak sedikit dan menjadi ancaman terbesar di negara kita.

Narkoba mengincar anak-anak

Sebuah data mengejutkan datang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Dari total 87 juta anakmaksimal 18 tahun, tercatat ada 5,9 juta yang tercatat sebagai pecandu. (okezone 6/3/2018)

Ini persoalan sangat serius, untuk itu Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh terus melakukan kegiatan pendekatan keluarga dan lingkungan untuk membentengi diri dari pengaruh narkoba. Razia narkoba dan merokok di Sekolah yang gencar dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan menggandeng berbagai instansi termasuk BNN diharapkan menjadi salah satu gebrakan melawan peredaran narkoba di Kota Gemilang.

Dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman terus mengkampanyekan anti narkoba. Upaya dirinya bersama Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin dan jajaran patut diberikan apresiasi dan dukungan bersama. Salah satu tekad yang disampaikan pimpinan kota ini adalah menghadirkan Pusat Rehabilitasi Banda Aceh dan Banda Aceh Bersih dari Narkoba.

Aceh Darurat Narkoba

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah risau terhadap kondisi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Aceh telah mencapai angka 63.032 jiwa di tahun 2017. Angka hasil survei nasional ini hanya dilakukan di beberapa daerah saja. Menurut Nova upaya bersama harus segera dilakukan. Dalam Rapat Kerja Bupati/Walikota se Aceh 27 November 2018 di Kota Langsa, Gubernur kembali menunjukkan tekadnya memberantas narkoba di Provinsi Aceh.

"Saya katakan semakin marak, sebab penyebarannya, tidak hanya di wilayah perkotaan, tapi sudah menyebar hingga ke gampong-gampong," ujar Plt Gubernur Aceh saat membuka rapat kerja bupati/walikota se-Aceh di ruang sidang DPRK Langsa, Selasa (Serambi 27/11).

Menurut Gubernur faktanya menunjukkan kuatnya jaringan narkoba di daerah ini, sehingga BNN dan Polda Aceh tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas narkoba, tanpa dukungan masyarakat.

Nova Iriansyah menyatakan yang terlibat narkoba bukan hanya anak muda, tapi juga orang dewasa dari berbagai profesi, mulai dari petani, pengusaha, ASN, dan TNI/Polri, bahkan anak-anak. "Data terakhir tahun 2018, Aceh berada di peringkat 5 peredaran narkoba di Indonesia," jelasnya sebagaimana dikutip dari Serambi.

Dalam kesempatan itu, Nova Iriansyah juga mengusulkan pembentukan Satgas Annar (api) atau satuan tugas anti narkoba disetiap gampong dalam melawan



peredaran gelap narkoba.

Gampong Bersih Narkoba

Gampong Lampaloh Kecamatan Lueng Bata telah diusulkan oleh BNN Kota Banda Aceh sebagai Desa Bersih (Bersih Narkoba) di Kota Banda Aceh. Pemilihan Gampong ini berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Juli 2018.

Narkoba menjadi musuh utama Indonesia. Sinergi seluruh pihak dibutuhkan untuk membebaskan Indonesia dari penyalahgunaan obat terlarang.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga ikut ambil bagian dalam upaya tersebut. Kementerian yang dipimpin Eko Putro Sandjojo itu menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) untuk memberantas narkoba di desa.

Dalam mewujudkan Banda Aceh Gemilang Tanpa Narkoba harus dimulai dari gampong-gampong. Keterlibatan pemerintahan gampong dalam memerangi narkoba melalui pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dimana disebutkan Desa mempunyai wewenang dalam membina masyarakat desa untuk berhak mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa agar terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa.

Tindak lanjut pembentukan Gampong Bersih, BNN Kota Banda Aceh telah melakukan pertemuan awal Diseminasi Informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk perangkat Gampong dan masyarakat setempat. Dalam waktu dekat akan dibentuk Posko dan Relawan Anti Narkoba serta melakukan koordinasi lanjutan dengan Babinsa Koramil dan Babinkamtibmas Polsek setempat.

Keberhasilan ini akan terasa ringan ketika dilakukan bersama-sama, dengan melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan. Peredaran gelap narkotika yang telah menyasar berbagai generasi muda harus disikapi cepat, tepat, serius dan fokus. Ingat! narkoba tidak lagi terlihat jauh di seberang lautan tetapi sudah "tiba" di depan pintu "rumah" kita. Bersiaplah!

*) Penulis adalah Kepala BNN Kota Banda Aceh

◆◆◆ REDAKSI

PENERBIT Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh | **PEMBINA** Walikota Banda Aceh - Wakil Walikota Banda Aceh | **PENGARAH** Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh **PENANGGUNG JAWAB** Bustami | **WAKIL PENANGGUNG JAWAB** T. Taufik Mauliansyah | **DEWAN REDAKSI** Jailani - Rahmat Khadafi - Maulidar - Jauhari | **PEMIMPIN REDAKSI** H.T Anwar | **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI/ REDAKTUR** **PELAKSANA** Mahdi Andela | **SEKRETARIS REDAKSI** Cut Ahmad Putra | **REPORTER** A. Sabur - Afrizal - Hafid Junaidi | **STAF REDAKSI** Azwar - Afifuddin - Teja Sukmajaya - Asna Mardhia - Izzan - Muhamrami - Devi Irawan | **FOTOGRAFER** Ratno Sugito | **LAYOUTER** Mulyadi



Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional I Kementerian Pariwisata RI Masruroh didampingi Ketua Penyelenggara API Hiro Kristianto menyerahkan piala Anugerah Pesona Indonesia (API) 2018 kepada Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pada malam penganugerahan API 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Pesona Halal Kota Gemilang

Banda Aceh memiliki banyak tempat yang dapat dijadikan magnet untuk mendatangkan wisatawan, terutama mereka yang berasal dari Asia Tenggara dan negara-negara berpenduduk muslim.

AMINULLAH Usman tersenyum lebar. Wali Kota Banda Aceh ini benar-benar bersyukur atas terpilihnya Banda Aceh sebagai salah satu penerima Anugerah Pesona Indonesia (API) 2018. Kali ini, Banda Aceh dinominasikan untuk kategori Wisata Halal Terpopuler; Masjid Raya Baiturrahman.

“Alhamdulillah, upaya kita semua untuk menggenjot sektor pariwisata Banda Aceh membawa hasil yang membanggakan,” kata Aminullah yang malah itu menghadiri acara

penyerahan penghargaan didampingi Kadis Pariwisata Banda Aceh M Rizha, di Jakarta, Kamis dua pekan lalu.

Penghargaan ini juga menjadi sebuah pemicu bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus berbenah. Menurut Aminullah, ada banyak sektor yang berpotensi menanggung untuk di bidang pariwisata. Banda Aceh memiliki banyak tempat yang dapat dijadikan magnet untuk mendatangkan wisatawan, terutama mereka yang berasal dari Asia Tenggara dan negara-negara berpenduduk muslim.

API merupakan ajang tahunan yang digelar oleh “Ayo Jalan-Jalan” bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Lewat ajang ini, pemerintah pusat memberikan penghargaan bagi objek dan destinasi wisata terpopuler di Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional I Kementerian Pariwisata Masruroh kepada Aminullah.

“Wisata halal merupakan salah satu poin yang gencar kita jual kepada wisatawan terutama dari negara-negara

yang mayoritas penduduknya muslim. Dan sejatinya Masjid Raya Baiturrahman telah menjadi ikon dunia sejak ratusan tahun lalu,” kata Aminullah.

Optimisme Aminullah ini bukan tanpa berdasar. Banda Aceh adalah bagian dari Aceh yang menerapkan syariat Islam. Dan hal itu tidak hanya berlaku dalam kehidupan sosial. Budaya halal dan syariat Islam juga menjadi bagian penting dari pengembangan pariwisata. Mulai dari objek wisata, penginapan, hingga kuliner.

Dalam banyak kesempatan, Aminullah senantiasa mengajak para pelaku usaha pariwisata untuk menerapkan konsep halal dan syariat Islam. Penghargaan dari pemerintah pusat itu, kata dia, akan semakin memotivasi pemerintah kota dan seluruh *stakeholder* wisata menyajikan pengalaman berwisata yang menyenangkan dan sesuai dengan syariat Islam.

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Penyelenggara API Hiro Kristianto mengatakan pihaknya ingin mendorong berbagai pihak untuk mempromosikan

pariwisata Indonesia. “Ini kali ketiga kami gelar sejak 2016 silam. Rangkaian pemilihannya mulai dari kampanye, *vote*, hingga malam penganugerahan.”

“Dalam perjalannya, API telah menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya. Kami berharap penghargaan ini dapat semakin memotivasi Pemda untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerahnya masing-masing,” katanya.

Dari 10 destinasi/event wisata nominasi API 2018 untuk kategori Wisata Halal Terpopuler, Banda Aceh dengan Masjid Raya Baiturrahman-nya berhasil masuk dalam posisi tiga besar bersama Al-Quran Al-Akbar (Palembang) dan Gema Muhamarram (Indragiri Hilir).

Selain Banda Aceh, tiga kabupaten/kota di Aceh juga berhasil meraih API 2018 yakni Kota Sabang untuk kategori Wisata Air Terpopuler (Pulau Weh), Aceh Tengah kategori Dataran Tinggi Terpopuler (Dataran Tinggi Gayo), dan Gayo Lues untuk kategori Atraksi Budaya Terpopuler (Tari Saman). **HAFID JUNAIDI**

peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata.

Pemerintah kota juga membutuhkan “tangan” pusat untuk menguatkan data dan informasi pariwisata serta survei profil wisatawan mancanegara untuk mengetahui pola perjalanan, pengeluaran dan umpan balik dari hasil kunjungan ke destinasi wisata.

Sementara dari dalam, pemerintah pusat diharapkan mampu membuka dan mempermudah akses bagi penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk usaha pariwisata yang didukung sosialisasi mekanisme penyalurannya.

Termasuk juga peningkatan mana-

jen penanganan sampah, limbah dan air bersih di destinasi wisata. “Pemerintah pusat juga dapat mendorong peningkatan kualitas SDM dan usaha pariwisata melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata,” kata Aminullah.

Kepada seluruh masyarakat, Aminullah berharap mereka terus memberikan pelayanan terbaik kepada setiap tamu yang datang ke Banda Aceh. Bersikap ramah, penuh kesopanan dan menjaga Banda Aceh tetap bersih.

“Jangan lupa, ekspos terus objek wisata kita ke medsos (media sosial) agar semakin dikenal dunia,” ujar Aminullah.

HAFID JUNAIDI

Pesan Wisata lewat Even hingga Medsos

ADA pesan penting yang disampaikan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman kepada Maruoh, Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional I Kementerian Pariwisata, usai menerima penghargaan Anugerah Pesona Indonesia (API) 2018. Pesan ini juga disampaikan

“Kami berharap kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk

menggelar sebanyak-banyaknya even di Banda Aceh guna mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri,” kata Aminullah.

Peran pemerintah pusat untuk mendorong perkembangan dunia pariwisata Banda Aceh cukup signifikan. Pemerintah pusat, kata Aminullah, dapat mendorong

Bekerja Tanpa Batas

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh juga ikut membantu memadamkan kebakaran di luar daerah tugas mereka. Karena bencana tak mengenal teritorial.

MALI KOTA Banda Aceh Aminullah Usman menyajikan satu per satu para penerima Fire Safety Award 2018 pertengahan bulan lalu. Penghargaan ini adalah bagian dari kampanye Sistem Proteksi Kebakaran yang diserahkan kepada 30 kepala lembaga yang berkantor di Banda Aceh.

Dalam kesempatan itu, Aminullah juga sangat mengapresiasi langkah pemilik dan pengelola bangunan yang menjalankan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

“Kepada penerima, kami ucapan selamat dan sukses telah memperoleh penghargaan ini, semoga ke depan terus dapat pertahankan dan ditingkatkan,” kata Aminullah. Dia juga berpesan agar seluruh bangunan di Banda Aceh dilengkapi dengan sarana prasarana proteksi kebakaran. Sehingga potensi bencana ini dapat dicegah sejak dini.

Menurut Aminullah, petugas pemadam kebakaran kerap diperlakukan saat musibah itu terjadi. Yang terjadi, kata Aminullah, adalah para petugas sering telat mendapatkan laporan tentang kejadian kebakaran di sebuah lokasi. Petugas, tambah Aminullah, bekerja sepenuh hati untuk memadamkan api dan mencegah kerusakan yang lebih besar lagi.

Nurdin sendiri berharap masyarakat bermitra dengan Pemadam Kebakaran. Artinya, kata Nurdin, masyarakat perlu mengubah persepsi tentang pemadam kebakaran dan peran mereka saat menghadapi kebakaran. “Masyarakat bukan objek, mereka adalah subjek yang mampu memproteksi kebakaran di lingkungan masing-masing.”

Peran serta masyarakat adalah kunci mengurangi potensi kebakaran di Banda Aceh. Dukungan ini berbentuk banyak hal, mulai dari ikut melaporkan potensi kebakaran kepada petugas hingga menyediakan sarana dan prasarana yang penting dalam pencegahan api membesar dan



menjalari bangunan.

“Dalam rangka mitigasi bencana atau mengurangi korban pada saat bencana, maka diperlukan kesiapsiagaan, baik kesiapan dari masyarakat maupun aparat,” kata Nurdin. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendorong sikap mitigasi terhadap bencana ini, Pemadam Kebakaran juga menggelar sosialisasi, simulasi dan pelatihan kepada masyarakat. Petugas, kata Nurdin, datang ke gampong-gampong untuk menjelaskan tentang penanggulangan kebakaran sejak dini.

Sementara di kawasan pertokoan dan perkantoran, kata Nurdin, pengelola bangunan harus memenuhi sistem proteksi kebakaran bangunan gedung seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

“Namun perlu kerja keras dan kerja sama dari seluruh lapisan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebakaran dan antisipasinya sejak dini. Apalagi anggaran perlengkapan dan peralatan bahan simulasi masih minim. Saat ini, beberapa gampong dan pemilik bangunan gedung telah mendapatkan pembekalan dan simulasi mitigasi bencana ini. Baru sekitar 15 persen masyarakat yang diberikan pemahaman tentang mitigasi kebakaran ini,” kata Nurdin.

Nurdin juga mengungkapkan selama ini, kebakaran di Banda Aceh banyak dipicu oleh korsleting listrik. Disusul dengan kecerobohan saat membakar sampah, kurangnya pengawasan terhadap anak-anak yang bermain korek api serta

kebocoran gas. Sementara Kecamatan Baiturrahman masuk dalam kategori daerah paling rawan kebakaran, disusul Kuta Alam dan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. “Kami sering mendapat kebakaran yang dipicu oleh pembakaran sampah yang dibiarkan,” kata Nurdin.

Saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran diawaki oleh 79 personil. Mereka juga diperkuat dengan 13 unit armada pemadam kebakaran yang disiagakan di lima titik tersebar di seluruh penjuru Banda Aceh. Di Posko Induk tersedia tiga unit armada tempur, tiga unit armada suplai, satu unit armada tangga. Di Pos Pango satu unit armada tempur, di Pos Simpang Mesra satu unit armada tempur, satu unit armada suplai, di Pos Peulangi satu unit armada tempur, satu unit armada suplai serta di Pos Keudah satu unit armada tempur.

“Kami masih kekurangan personil. Idealnya, satu armada diawaki enam personil. Kami juga masih terkendala armada tua dan bongsor. Sehingga sulit masuk ke inti kebakaran yang berada di lokasi sempit,” kata Nurdin. “Idealnya perlu penambahan armada kecil yang andal.”

Namun hal ini tak terlalu menjadi penghalang mereka dalam bertugas. Bahkan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh sering kali membantu memadamkan api di Aceh Besar. Menurut Nurdin, bencana tak mengenal wilayah.

“Demikian juga pemadam kebakaran. Kami bekerja tanpa batas atas nama kemanusiaan. Kami berharap, masyarakat mau mendukung dengan peduli terhadap potensi bencana kebakaran di sekitar tempat tinggal mereka,” kata Nurdin. **A SABUR**

Anugerah Keselamatan

30 Instansi didaulat menerima Fire Safety Award 2018, Wali Kota Banda Aceh Aminullah menyerahkan penghargaan yang dibagi dalam dua kategori, Gold dan Silver.

PENERIMA KATEGORI GOLD:

BPK-RI Perwakilan Aceh
Gedung Keuangan Negara
Bank Indonesia Perwakilan Aceh
BRI Cabang Banda Aceh
BNI Cabang Banda Aceh
Bank Bukopin Banda Aceh
Hotel Hermes Palace
Pengelola Pasar Aceh
Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh
SPBU Simpang Jam
RSUD dr Zainoel Abidin
RSUD Meuraxa
RSIA Aceh

KATEGORI SILVER:

PT PLN Induk Wilayah Aceh
Bank Danamon Banda Aceh
Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
PT Taspen Cabang Banda Aceh
Balai Arsip Statis dan Tsunami
BPS Provinsi Aceh
PT PLN UP3 Banda Aceh
Hermes Palace Mall
Hotel Oasis Banda Aceh
Hotel Grand Nanggroe
Hotel Ayani
Hotel Grand Permata Hati
Suzuya Mall
SPBU Lamnyong
KFC Terminal Bathoh
Hotel Seventeen 17
RS Pertamedika Ummi Rosnati

Kala SKPK Semakin Terbuka

Wali Kota Banda Aceh mendorong SKPK meningkatkan penyajian informasi kepada publik menjadi lebih baik lagi.

AKETERBUKAAN informasi adalah sesuatu yang mutlak di zaman ini. Karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berbenah dengan menyajikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat dan publik secara luas.

Buah dari keterbukaan ini terlihat jelas saat 10 Pejabat Pengelola Informasi Daerah di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh menerima penghargaan dari Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Semua penerima penghargaan ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menjadi lebih transparan.

Keterbukaan informasi publik saat ini adalah sebuah keniscayaan. Memang ada beberapa informasi yang dikecualikan, namun menurut saya, publik berhak mengetahui apa yang dilaksanakan pemerintahnya," kata Aminullah usai menyerahkan penghargaan kepada 10 PPID terbaik didampingi oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin; Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Bahagia; dan Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Sandi Provinsi Aceh, Marwan Nusuf.

Penghargaan ini diserahkan pada acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) PPID yang digelar di Aula Lantai IV, Gedung Mawardi Nurdin, Balai Kota Banda Aceh, Senin, akhir November lalu. Mereka dinilai berdasarkan pelayanan PPID, pengelolaan situs resmi, dan ketersediaan informasi teranyar, baik yang disajikan dalam bentuk *link* maupun *hard copy*.



Usai menyerahkan penghargaan ini, Aminullah mengatakan penghargaan ini juga diberikan upaya mendorong SKPK meningkatkan penyajian informasi kepada publik menjadi lebih baik lagi.

Menurut Aminullah, pemerintahan yang baik (good government) merupakan salah-satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan hasil prestasi dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dan ini telah terjawab dengan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang membantu menyajikan informasi berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat umum.

PPID adalah pejabat yang menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Keberadaan mereka adalah buah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang hampir satu dekade diterapkan. Dengan aturan ini diharapkan pengelolaan pemerintahan dapat lebih transparan. Program-program pemerintah pun dapat berubah menjadi lebih akuntabel. PPID menjadi pintu bagi publik untuk mendapatkan informasi sesuai dengan standar yang diatur dalam undang-undang.

"Dengan adanya PPID ini juga, diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat ber-

jalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi," harap Aminullah.

Menurut Aminullah, banyak informasi tentang program pemerintah dan pembangunan dan informasi itu harus selalu disajikan sehingga masyarakat mengetahui kegiatan pemerintah. Dengan demikian, publik akan semakin terlibat. Partisipasi publik dalam pelaksanaan pemerintahan, kata Aminullah, adalah kunci keberhasilan pembangunan.

Aminullah juga menilai Rakornis PPID ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap SKPD menyampaikan informasi-informasi kepada publik yang sesuai dengan perundang-undangan. Dia menegaskan bahwa pemerintah kota harus mampu menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

"Pemerintah kota terus kita dorong untuk selalu menyajikan informasi program pembangunan kepada masyarakat," tambah Aminullah.

Selain menyajikan informasi, pemerintah kota juga membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan saran, masukan dan kritik konstruktif. Untuk itu, pemerintah kota membuat banyak akses yang menyentuh langsung masyarakat, seperti program Wali Kota Menjawab, Aplikasi Suwarga hingga membuka *Call Center* untuk menyampaikan

masyarakat," kata Zainal.

Piasan Seni juga berpotensi menarik perhatian wisatawan untuk datang ke Banda Aceh. Agenda-agenda kesenian, kata dia, memang menjadi salah satu magnet yang mendorong jumlah kunjungan wisata. "Kita punya banyak objek wisata yang dapat dijual. Mulai dari wisata sejarah,

berbagai laporan dari masyarakat kota.

"Semua ini kita lakukan agar kita bisa mengetahui seperti apa keinginan warga. Kemudian semua itu kita jadikan sebagai bahan dalam merancang program pembangunan yang berbasis aspirasi," kata Aminullah.

Kepada seluruh jajarannya, Aminullah meminta mereka menyajikan informasi dengan cara yang lebih baik. Semua program harus tersampaikan dengan baik kepada publik dengan bekerja sama dengan media massa. Aminullah juga meminta semua informasi terbaru diunggah di situs-situs milik satuan kerja perangkat kota.

Kepala Diskominfo Kota Banda Aceh, Bustami, optimistis dengan manfaat Rakornis ini. Menurut dia, para PPID yang hadir mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait tahapan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan publik. PPID juga diharapkan menularkan ilmu yang mereka dapat dari rakor ini kepada PPID pembantu. "Terutama terkait pengelolaan website yang dituntut harus selalu update," kata Bustami. **AFRIZAL**

DAFTAR 10 PPID TERBAIK

1. DLHKKK (78 poin)
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (77)
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (75)
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (73)
5. Bappeda (71)
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kota (poin 69)
7. Disdukcapil (63)
8. Badan Kesbang dan Politik (61)
9. Inspektorat (60)
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (60)

digaungkan lewat ajang piasan seni kali ini."

Tahun ini, Piasan Seni 2018 dengan tema "Kreatif Tanpa Henti". Acara ini berlangsung mulai 16-18 November 2018 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Ini merupakan perhelatan terbesar di pengujung tahun ini.

Ajang tahunan Pemko Banda Aceh ini menampilkan musikalisisasi puisi, lomba musik kontemporer etnik Aceh (musik garapan), tari tradisi, lomba tari kreasi, dan banyak lainnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banda Aceh menggelar M Rizha mengatakan perhelatan tahunan ini menampilkan berbagai kreativitas seni dan merupakan salah satu program andalan dinas di bidang seni dan pariwisata. Pihaknya melibatkan komunitas seni dan pelaku seni yang ada di Banda Aceh. "Harapannya adalah untuk membawa arah seni di Banda Aceh semakin baik dan semakin dikenal dunia," kata Rizha. **MAHDI**



wisata budaya, wisata religi, wisata edukasi tsunami, wisata kuliner hingga wisata bahari. Dan tentu saja kesenian seperti yang

TABUHAN rapa'i Zainal Arifin, Wakil Wali Kota Banda Aceh, menjadi penanda dibukanya Piasan Seni 2018. Bersama-sama Zainal, Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Bahagia, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Erwin Desman dan Kepala Dinas Pariwisata Banda Aceh M Rizha juga ikut memukul alat musik tradisional Aceh itu di atas pentas utama ajang kesenian tahunan di Banda Aceh itu, pertengahan November lalu.

Sejak 2012, Piasan Seni menjadi agenda penting kesenian di Banda Aceh. Dalam sambutannya, Zainal mengatakan Piasan Seni digelar menjaga "api" kreativitas generasi muda. Di sinilah para pegiat seni dapat menumpahkan ekspresi dan kreasi mereka untuk dinikmati semua kalangan.

Pesan Aman di Jalan Nyaman



Kecelakaan di jalan terjadi akibat pengguna tak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di sepanjang jalan.

"KITA perlu berubah. Dan kita memang harus berubah," kata-kata ini muncul dari mulut Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman saat dimintai tanggapan mengenai perilaku berkendaraan di jalan raya. "Mindset kita tidak sejalan dengan perkembangan kendaraan dan lalu lintas. Ini sangat berisiko terhadap keselamatan di jalan raya."

Aminullah berharap banyak terhadap perubahan perilaku di jalan raya ini. Apalagi saat ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan untuk mengaspal seluruh jalan kota. Tak terkecuali jalan-jalan kecil yang biasa disebut gang. Ini adalah bagian dari program 'Kotaku' yang berjalan di Banda Aceh.

Program ini meliputi 35 gampong pada 2018, mengikuti 15 gampong yang telah menerima aspal mulus tahun lalu. Pengaspalan ini menjadikan jalanan di Banda Aceh lebih lancar dilalui pengendara. Dari sisi estetika, Banda Aceh akan menjadi lebih indah. Kendaraan dapat meluncur mulus dan pengendara

dapat berkendara dengan lebih nyaman.

Tapi semua keindahan ini tak akan menjadi lebih nyaman dan indah jika masyarakat tidak tertib dalam berlalu lintas. Aminullah mengungkapkan, kecelakaan di jalan terjadi akibat pengguna tak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di sepanjang jalan.

"Pengguna kendaraan enggan me-niati aturan. Tak mau memakai helm, menerobos jalur, kebut-kebut, berbongcengan tiga bahkan empat dan melanggar lampu merah. Pelanggaran-pelanggaran ini sangat membahayakan diri pengemudi dan pengguna jalan lain," kata Aminullah.

Untuk itu, pada peringatan Pekan Kese-

lamatan Jalan dan Hari Guru Nasional, Aminullah menyampaikan pesan keamanan berkendara ini kepada para pengunjung car fee day (CFD). Dia meminta masyarakat mau berubah dan membiasakan tertib berlalu lintas kepada anak-anak sejak dini. Aminullah sangat mendukung acara yang didukung oleh Dishubkomintel Aceh ini untuk menumbuhkan kesadaran tertib berkendara.

Ketua panitia kegiatan M Hanung Kuncoro menambahkan sosialisasi rutin tersebut telah diadakan sejak Oktober akhir hingga November. Acara ini memang ditujukan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat agar tertib berkendara di jalan raya.

"Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dinas perhubungan lakukan, dan kali ini kami memilih arena CFD sebagai tempat yang tepat untuk dilaksanakannya sosialisasi. Maka dari itu semoga kegiatan ini dapat berguna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Aceh sejak dini, apalagi di arena CFD ini juga banyak diikuti oleh anak-anak," kata Hanung.

Dalam sosialisasi ini juga terdapat se-rangkaian kegiatan, seperti lomba me-warnai, lomba desain grafis dengan tema tertib berlalu lintas. Ada juga penan-datanganan kesepakatan dengan sejumlah sekolah sebagai pelopor keselamatan jalan. Pembukaan Pekan Keselamatan Jalan Aceh 2018 tersebut ditandai dengan pemakaian helm oleh Aminullah, pimpinan DPRA, pimpinan Jasa Raharja Aceh dan beberapa pejabat lainnya kepada para pelopor keselamatan jalan.

Di sela-sela kegiatan CFD tersebut, Aminullah juga memberikan 10 paket bantuan dari Rumah Zakat dan Vanilla Hijab bagi para guru secara simbolis. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka merayakan Hari Guru Nasional. Terdapat 100 paket berisi pakaian dan hijab yang akan dibagikan secara acak kepada guru-guru di Banda Aceh. **MAHDI**

Gampong Inovasi Memberi Solusi

BANDA ACEH - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, Dwi Putrasyah, mengatakan pihaknya siap memberikan sosialisasi kepada perangkat desa dalam penggunaan dana desa. Apalagi pembangunan gampong sangat memerlukan kerja sama antargampong.

"Pembangunan dalam suatu wilayah akan lebih mudah untuk direncanakan dan dilaksanakan dengan kerja sama. Kami mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama dalam semua aspek untuk mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah," ujar Dwi Putrasyah, Selasa pekan lalu.

Langkah yang dilakukan Dinas PMG adalah memberikan pendampingan, memfasilitasi dan berkoordinasi secara efektif. Sehingga kemampuan aparatur

gampong semakin meningkat dalam mengelola administrasi yang baik. Apalagi, kata Dwi, Wali Kota Banda Aceh berpesan agar aparatur gampong mampu menyusun rencana kerja yang transparan dan akuntabel, tentunya dengan berbagai inovasi untuk mencapai hasil maksimal.

Menurutnya, penggalian potensi sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang berada di gampong dapat memberikan solusi atas permasalahan lokal. Karena yang paling mengenal kondisi, permasalahan dan gambaran penyelesaian masalah itu adalah warga gampong sendiri. Dinas, kata Dwi, hanya membantu memfokuskan ide-ide dan inovasi tersebut.

"Sekaligus dapat mempertemukan antara kebutuhan pembangunan daerah dengan potensi unggulan setempat," kata



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, Dwi Putrasyah.

Dwi.

Masyarakat yang sedang berkembang tentu berkaitan erat dengan kebutuhan inovasi, misalkan penemuan-penemuan baru baik itu berupa gagasan (ide-ide), tindakan (metodologi) atau peralatan baru (teknologi). Karena inovasi merupakan

salah satu faktor untuk memperlancar terjadinya perubahan sosial dan inti dari pembangunan masyarakat. Dengan adanya inovasi dalam lingkungan masyarakat di gampong, masyarakat akan mampu mengembangkan sumber daya diri dan lingkungan secara mandiri. **A. SABUR**

Ponten Hijau Kota Gemilang

Skor mendekati 100 tak berarti lembaga yang bersangkutan terbebas sepenuhnya dari potensi korupsi. Di sistem sebaik apapun, para penjahat akan mencari celah untuk melakukan korupsi.

BANDA ACEH bakal menutup tahun dengan sebuah pencapaian yang baik. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ponten 77,39 bagi Pemerintah Kota Banda Aceh hasil survei penilaian integritas. Rata-rata skor Indeks Penilaian Integritas Tahun 2017 di 36 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berada di angka 66.

“Yang paling tinggi tahun 2017 itu dicapai oleh Pemkot Banda Aceh, nilainya 77,39. Paling bawah adalah Pemerintahan Provinsi Papua sekitar 52,91,” kata Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu dua pekan lalu.

Skala indeks penilaian integritas dari angka 0 sampai 100. Nilai mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi semakin rendah dan adanya kemampuan sistem merespons kejadian korupsi dan pencegahan korupsi lebih baik. Survei penilaian integritas ini dilakukan secara mandiri oleh 36 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam teknis pelaksanaan survei ini, komisi antirasuah itu dibantu Badan Pusat Statistik (BPS). Penilaian dilakukan oleh responden internal dan eksternal lembaga berdasarkan pada dimensi persepsi dan pengalaman responden terkait budaya anti-korupsi, pengelolaan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia dan sistem antikorupsi.

Sementara itu, skor tertinggi lainnya diperoleh Pemkab Bandung sebesar 77,15; Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan sebesar 76,54; Kementerian Kesehatan sebesar 74,93; Pemkot Madiun sebesar 74,15; dan Kementerian Perhubungan sebesar 73,4. Untuk skor terendah lainnya diperoleh Pemprov Maluku Utara sebesar 55,29; Kepolisian RI sebesar 54,01; Pemprov Banten sebesar 57,64; Pemkot Bengkulu sebesar 58,58;

dan Pemprov Papua Barat sebesar 59,1.

“Dari kepolisian di situ ada (skor) 54,01, tapi dikasih tanda bintang karena sampai hari terakhir pelaksanaan survei ini teman-teman dari kepolisian belum menyampaikan survei responden internalnya, jadi kita baru dapat survei responden eksternalnya ini,” papar Wawan.

Wawan mengatakan skor mendekati 100 tak berarti lembaga yang bersangkutan terbebas sepenuhnya dari potensi korupsi. Menurut Wawan, di sistem sebaik apapun, para penjahat akan mencari celah untuk melakukan

penilaian integritas ini sebanyak 2084. Mereka terdiri dari pejabat utama, pejabat administrator, pejabat pengawas hingga staf fungsional umum.

Sementara jumlah responden eksternal sebanyak 2142. Mereka merupakan pengguna layanan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Survei ini menggunakan wawancara tatap muka dan pengisian kuisioner terhadap responden internal dan eksternal.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman sendiri mengaku bangga. Dan berharap pencapaian ini tidak membuat Pemerintah Kota Banda Aceh lengah. Hasil



korupsi. Indeks ini, kata dia, juga bisa menjadi acuan bagi lembaga terkait untuk melakukan perbaikan kualitas sistem pencegahan korupsi.

Wawan juga berharap indeks penilaian integritas berikutnya bisa melibatkan banyak lembaga lainnya baik di tingkat pusat dan daerah. Adapun jumlah responden internal dalam survei

survei ini, kata dia, akan menjadi modal yang akan mengawal pembangunan Banda Aceh menjadi lebih baik dan transparan di masa yang akan datang.

“Cela korupsi pasti ada. Namun dengan pengawasan bersama, terutama keterlibatan masyarakat, potensi ini akan kita redam bersama,” kata Aminullah. **HAFID JUNAIDI**

Melek Aturan di Dunia Maya



BANDA ACEH – Perkembangan teknologi yang pesat membuat semua orang lebih mudah mengakses menyampaikan ide di dunia maya. Namun hal ini bukan tanpa celah. Banyak orang yang terjerat pidana karena tidak memahami aturan main di dunia maya.

“Banyak orang yang menggunakan

gadget cerdas namun tidak cerdas dalam menggunakanannya,” kata Asisten Administrasi Umum Tarmizi Yahya mewakili Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman saat membuka Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2018, di Balai Kota, Selasa pekan lalu.

Karena itu, pemerintah kota berharap

sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman para pengguna dunia maya agar tidak terjebak dalam pelanggaran aturan yang memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini juga tidak selamanya digunakan untuk kesejahteraan dan kemajuan. Bagi sebagian orang, teknologi informasi dan komunikasi ini juga dapat menjadi salah satu senjata ampuh untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti munculnya aktivitas prostitusi online, perjudian di dunia maya, pembobolan ATM dan pencurian data-data perusahaan melalui internet yang semuanya dikategorikan sebagai kejahatan penyalahgunaan pada transaksi elektronik.

Kehadiran UU ITE ini diharapkan dapat mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah, agar tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi moral dan etika. Ditambah lagi, tugas pelayanan dengan pengaruh global saat ini mengharuskan para aparatur mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat dan benar. “Jangan sampai hal ini justru merugikan kita atau bahkan sampai menjerat secara hukum,” kata Tarmizi mengingatkan.

Pemerintah Kota Banda Aceh menyambut baik dilaksanakannya sosialisasi ini sebagai upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana regulasi ini merupakan payung hukum untuk memberikan perlindungan secara maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) kota Banda Aceh, Bustami, mengatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik juga memberikan perlindungan hukum pada aktivitas yang berbasis elektronik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi informasi.

“Dalam UU ITE tegas dinyatakan tentang diatribusi dan atau transmisi, konten ilegal, kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemeriksaan, pengancaman, berita bohong atau SARA,” ujar Bustami. **A. SABUR**

Gusmeri, Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

Budaya Inklusif di Kota Gemilang

TAHUN lalu, inisiasi para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk menjadikan daerahnya menjadi kota inklusif bergema di Jakarta. Ini adalah konsep menjadikan kota-kota di Indonesia menjadi liveable city atau kota yang nyaman ditinggali.

Di Banda Aceh, konsep ini tengah dijalankan. Kelak seluruh fasilitas publik di Banda Aceh, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata penting di Sumatera, akan lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Ada aturan bersifat mengikat dan dipatuhi segenap warga kota sehingga para penyandang disabilitas dapat terlibat langsung, layaknya warga kota lain, tanpa diskriminasi.

“Pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas tidak hanya di kantor-kantor pemerintah. Transportasi publik, fasilitas kesehatan, atau fasilitas pendidikan, harus ramah terhadap penyandang disabilitas. Ini yang tengah kita bangun di Kota Gemilang ini. Ini menjadi salah satu fokus Wali Kota Banda Aceh,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Gusmeri. Berikut wawancaranya:

Apa sebenarnya kota inklusif itu?

Salah satu isu yang mencuat adalah terkait dengan visi menciptakan kota yang inklusif. Kota inklusif secara umum bisa didefinisikan sebagai kota yang menciptakan lingkungan yang ramah, aman dan layak huni bagi seluruh warga kota, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya. Isu kota inklusif semakin mencuat seiring dengan lahirnya Sustainable Development Goals (SDG's) sebagai agenda global dunia 2015-2030. Salah satu isu utama dalam SDG's adalah inklusi sosial, yang mencakup pendidikan inklusif, ekonomi yang inklusif, infrastruktur yang inklusif, mengurangi kesenjangan, kota dan pemukiman yang inklusif, dan masyarakat yang inklusif.

Bagaimana langkah Bappeda Kota Banda Aceh?

Badan Perencanaan Daerah Kota Banda Aceh memegang peranan penting dalam menyukkseskan perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh. Untuk itu, Bappeda harus mampu beradaptasi dengan isu-isu global terkait perencanaan pembangunan kota di dunia. Bappeda sebagai motor perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh harus mendorong pembangunan Banda Aceh yang inklusif dan ramah bagi kaum disabilitas.

Bagaimana dengan kesiapan Banda Aceh untuk menjadi kota inklusif?

Saat ini, Pemerintah Kota telah menjalankan berbagai upaya untuk melangkah

menuju kota inklusif. Namun masih banyak pula permasalahan terkait pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas, baik dari segi ekonomi, sosial-budaya, politik dan spasial.

Sektor apa saja yang memungkinkan terwujudnya Banda Aceh menjadi bagian dari kota-kota yang peduli terhadap penyandang disabilitas ini?

Kami melihat pentingnya upaya harmonis yang melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta dan tokoh masyarakat seperti ulama dan akademisi untuk mencapai Kota Banda Aceh yang inklusif dan ramah disabilitas.

Apa permasalahan utama terkait pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Banda Aceh saat ini?

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh kaum disabilitas di Banda Aceh saat ini, seperti sulitnya akses ke lapangan kerja sehingga banyak kaum disabilitas tidak berdaya secara ekonomi. Selain itu, mereka juga sulit mengakses pendidikan berkualitas. Mereka juga harus menghadapi stereotype dan stigma negatif dari masyarakat. Akibatnya, banyak di antara mereka cenderung tertutup dan tidak aktif dalam kegiatan sosial.

Apa penyebabnya?

Infrastruktur dan layanan kita juga masih banyak yang tidak ramah disabilitas. Taman dan tempat rekreasi belum bisa diakses kaum difabel. Tempat ibadah seperti masjid yang seharusnya menjadi simbol kesetaraan bagi muslim ternyata juga belum ramah bagi penyandang disabilitas. Transportasi publik juga sulit diakses oleh kaum difabel. Oleh karena itu, jarang sekali kita lihat warga difabel melakukan kegiatan layaknya warga lainnya.

Langkah apa saja yang telah diambil Pemerintah Kota menuju kota inklusif?

Alhamdulillah saat ini Banda Aceh telah melahirkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif dan sedang menyusun beberapa Peraturan terkait pemenuhan hak-hak kaum difabel saat ini, seperti hak mereka terhadap pekerjaan. Kita juga telah melakukan berbagai upaya untuk membantu kaum disabilitas, seperti melalui bantuan sosial, bantuan pelatihan dan bantuan modal. Namun, masih banyak pula kekurangan yang perlu kita perbaiki agar Banda Aceh menjadi kota yang betul-betul ramah bagi semua golongan. Saat ini, harus kita akui bahwa jalan kita masih jauh untuk menjadi kota inklusif sebagaimana kota-kota inklusif lainnya di dunia.

Siapa lagi yang harus berperan untuk mewujudkan cita-cita ini?

Ulama dan tokoh masyarakat juga memegang peranan penting, terutama dalam membantu warga disabilitas dalam melawan stigma dan stereotype negatif serta membantu mengintegrasikan warga difabel dalam pergaulan masyarakat.

Seberapa penting peran masyarakat dalam mencapai kota inklusif?

Salah satu elemen penting kota inklusif adalah masyarakat yang inklusif. Dengan kata lain, masyarakat yang menghargai hak penyandang disabilitas. Selama ini, masyarakat umumnya menganggap kelompok disabilitas sebagai objek amal dan belas kasihan. Ada pula yang melekatkan stigma kepada kelompok disabilitas sebagai kelompok yang tidak berdaya. Stigma dan stereotype ini mengakibatkan banyak penyandang disabilitas mengalami pengasingan dari pergaulan masyarakat dan bahkan dalam keluarganya sendiri.

Bagaimana langkah untuk melawan stigma dan stereotype negatif bagi disabilitas?

Masyarakat harus mengubah pola pikir terhadap penyandang disabilitas. Sudah saatnya kita menghargai mereka dan menerima mereka dalam kegiatan masyarakat layaknya warga lainnya. Mereka memiliki hak terhadap layanan dan fasilitas sebagaimana warga biasa. Pengasingan dan rasa malu memiliki anggota keluarga yang memiliki disabilitas harus dihilangkan. Warga difabel yang terlanjur merasa rendah diri akibat disabilitas yang mereka miliki harus diberikan motivasi dan akomodasi agar berdaya.

Keluarga perlu mendorong mereka agar berpendidikan tinggi. Keluarga memegang peranan menentukan dalam memotivasi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, keluarga merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang inklusif.

Apa target dari perencanaan pembangunan inklusif di Kota Banda Aceh?

Targetnya adalah Kota Banda Aceh yang inklusif, artinya ramah bagi semua golongan, termasuk golongan marginal seperti kaum disabilitas. Ruang kota harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Mereka harus bisa melakukan kegiatan sehari-hari layaknya warga biasa. Mereka bisa bekerja, sekolah, kuliah, berekreasi, bermain dan beribadah seperti warga kota lainnya. Dengan demikian, desain kota dan infrastruktur kota harus ramah disabilitas. Untuk itu, partisipasi kelompok disabilitas dalam perencanaan pembangunan juga perlu ditingkatkan. Inilah inti dari perencanaan pembangunan inklusif.

Anda yakin kita bisa berubah?

Kita harus berubah, dan kita perlu untuk berubah. Kota inklusif adalah bagian dari ajaran Islam yang mengedepankan kesetaraan terhadap seluruh manusia. Kita bisa mencontoh banyak kota dunia yang berhasil menciptakan lingkungan kota yang ramah bagi semua golongan.

Selain itu, kita perlu menciptakan masyarakat yang sadar akan hak-hak penyandang disabilitas dan menerima mereka layaknya warga biasa lainnya.

